

## ABSTRAK

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan adanya *state borderless* hal ini mengakibatkan terbukanya hubungan interaksi masyarakat antar negara di dunia. Dapat diketahui bersama bahwa globalisasi ekonomi telah menyebabkan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Pada satu sisi hal ini mampu menunjang kemajuan pembangunan dunia industri melalui transplantasi sistem kerja dan penguasaan teknologi serta keterampilan baru bagi dunia industri di tanah air. Namun di sisi lain hal ini jelas akan memperkecil kesempatan kerja bagi WNI yang memiliki kualitas keahlian dan pendidikan yang kalah dengan TKA yang hadir. Keadaan demikian menjadi semakin dilematis dengan tidak siapnya politik hukum ketenagakerjaan dalam menyambut masuknya TKA di tanah air. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya secara jelas batasan jumlah dan lama waktu penggunaan TKA di tanah air. Sehingga perlu kiranya diteliti lebih lanjut terkait beberapa persoalan yang antara lain berupa: 1. Benarkah politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan? 2. Apa saja kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini? 3. Bagaimana Rekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan? Adapun penelitian tersebut bertujuan antara lain: 1. Untuk menganalisis kebenaran politik hukum tenaga kerja asing saat ini belum berkeadilan. 2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan politik hukum tenaga kerja asing saat ini. 3. Untuk merekonstruksi politik hukum tenaga kerja asing yang berbasis nilai keadilan. Penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal atau yuridis sosiologis. Adapun dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing belum mampu mewujudkan keadilan hal ini dikarenakan politik hukum penggunaan tenaga kerja asing telah mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi TKI dalam negeri yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan politik penggunaan tenaga kerja asing ialah kekurangan berupa batasan waktu dan jumlah penggunaan tenaga kerja asing tidak diatur secara jelas dalam politik hukum ketenagakerjaan asing di Indonesia, kemudian kelemahan dalam hal adanya dualisme izin kerja bagi WNA dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2011. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi hukum pada ketentuan dalam Pasal 42 UU. No. 13 Tahun 2003, Pasal 2 Perpres No. 20 Tahun 2018, Pasal 9 Permenakertrans No. 10 Tahun 2018, dan Pasal 61 UU. No. 6 Tahun 2011.

Kata Kunci: Nilai Keadilan, Politik Hukum, Rekonstruksi, Tenaga Kerja Asing

## Abstract

Globalization and advances in information and communication technology have created a borderless state, this has resulted in the opening of public interaction relations between countries in the world. It can be known together that economic globalization has led to the entry of foreign workers into Indonesia. On the one hand, this is able to support the progress of industrial development through the transplantation of work systems and mastery of technology as well as new skills for the industrial world in the country. But on the other hand, this will clearly reduce the speed of work for Indonesian citizens who have the quality of expertise and education that are inferior to the foreign workers who attend. This situation has become increasingly dilemma with the unpreparedness of labor law politics in welcoming the entry of foreign workers in the country. This is shown by not clearly regulating the limits for the number and length of time the use of foreign workers in the country. So it is necessary to further investigate several issues, including: 1. Is it true that the current legal politics of foreign workers are not fair? 2. What are the weaknesses of the current foreign labor law politics? 3. How is the reconstruction of legal politics for foreign workers based on justice values? The research aims include: 1. To analyze the legal political correctness of foreign workers who are currently not fair. 2. To analyze the weaknesses of the current legal politics of foreign workers. 3. To reconstruct the legal politics of foreign workers based on the value of justice. This dissertation research uses non-doctrinal or juridical sociological research. As for this research, it is found that the implementation of the politics of using foreign workers has not been able to bring justice to this, because the politics of law on the use of foreign workers has resulted in reduced employment opportunities for domestic workers which in turn has resulted in unemployment and poverty problems. The weaknesses in the implementation of the politics of using foreign workers are the shortcomings in the form of time limits and the amount of use of foreign workers is not clearly regulated in the politics of foreign labor law in Indonesia, then weaknesses in the dualism of work permits for foreigners in Law No. 13 of 2003 and Law no. 6 of 2011. So it is necessary to carry out legal reconstruction of the provisions in Article 42 of the Law. No. 13 of 2003, Article 2 of Presidential Decree No. 20/2018, Article 9 Permenakertrans No. 10 of 2018, and Article 61 of the Law. No. 6 of 2011.

Keywords: The Value of Justice, Political Law, Reconstruction, Foreign Workers